

Dinamika Konflik Bersenjata Sektarian Sunni – Syiah Lebanon Utara (2011-2015)

The Dynamics of Sunni-Syiah Armed Conflict in the North Lebanon (2011-2015)

¹Samudra Eka Cipta, ²Bondan Kanumoyoso, ³Wawan Darmawan

Email : ¹samudra.eka@ui.ac.id , ²bondan.kanumoyoso@ui.ac.id , ³wawand@upi.edu
Universitas Indonesia; Universitas Indonesia; Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Article history

Received 1 November 2021

Revised 28 December 2021

Accepted 31 December 2021

Keywords

Konflik, Sunni, Syiah, Lebanon

One of the causes of The Sunni-Shia conflict in Lebanon is political problems, especially the jealousy of Shia towards the Sunni. The residents of Bab El Tabbaneh and Jabal Mohsen have been victims of civil war since 1975. However, Lebanon's conflict peaked in the 2011-2014 period after a domino effect from Syria, when a crisis hit the region. Assad's government is Shia, while the Sunni rebel groups have influenced Lebanon. The armed civil conflict in Bab El Tabbaneh and Jabal Mohsen, a village in the Tripoli region, began when a group of people expressed their support for the Syrian rebels, causing a reaction from the Alawite Shia community. As a consequence, a conflict broke out. This study uses a historical approach and descriptive analysis that describes the development of the sectarian strife in Lebanon during 2011-2015. The results o show that the sectarian war that occurred in Lebanon is a form of unsuccessful resolution of the conflict.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Jika hubungan antara Lebanon dan Suriah dapat diringkas dalam beberapa kata, semua istilah yang kontradiktif ini akan sesuai dengan situasi saat ini. Sepanjang sejarah, penyatuan, kolonisasi, pemisahan, perang, dan imigrasi, kedua negara ini telah membangun apa yang bisa disebut sebagai dinamika “intimestranger” di antara populasi yang sesuai (Picard, 2016). Ikatan kompleks ini dapat dilihat melalui lensa krisis pengungsi Suriah saat ini di Lebanon, dan lebih khusus lagi melalui hubungan komunitas tuan rumah pengungsi yang berkembang di sekitarnya. Hubungan rumit antara Suriah dan Lebanon bertumpu pada penentuan bersama dan kepentingan ekonomi yang tak terpisahkan, perilaku berbasis identitas dan modal sosial. Sejak pecahnya perang

Suriah pada tahun 2011, lebih dari 5 juta warga Suriah telah meninggalkan negara itu, sebagian besar ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Turki dan Lebanon. Sekitar 6 juta warga Suriah tetap menjadi pengungsi internal pada tahun 2017 (Hibatullah, n.d.) Hingga hari ini, ada hampir 1 juta pengungsi Suriah yang terdaftar di Lebanon, ditambah dengan perkiraan 500.000 yang tidak terdaftar (Nala Estriani, 2018). Mengingat bahwa populasi Lebanon total sekitar 4 juta, ini sesuai dengan Suriah membuat lebih dari seperempat dari total populasi negara.

Lonjakan populasi telah mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi dan politik negara tuan rumah, yang diterjemahkan ke dalam ketegangan seputar pekerjaan dan mata pencaharian, serta meningkatnya kekerasan antara komunitas yang berbeda. Lebih penting lagi, ada keprihatinan akademis dan politik yang kuat dengan dinamika antara komunitas tuan rumah dan pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah menjadi sasaran diskriminasi, seringkali mengarah pada kekerasan, dari tuan rumah Lebanon. Hal ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang keras, yang membatasi akses mereka ke tempat tinggal resmi dan pasar kerja lokal. Permusuhan bervariasi dari jam malam kotamadya, pengkambinghitaman dan kekerasan dari komunitas tuan rumah, dan permusuhan umum terhadap pengungsi. Ketegangan mengakibatkan ekonomi dan infrastruktur, yang tampaknya merupakan akar penyebab permusuhan lebih lanjut (Abighanem, 2021).

Namun, setiap studi tentang Lebanon tidak boleh terbatas pada ekonomi atau infrastruktur saja. Faktor-faktor ini pada gilirannya tertanam dalam pengaturan yang dicirikan oleh perpecahan politik dan sektarian yang merupakan fitur yang tidak dapat dihindari dari konteks dan modal sosial penduduk tuan rumah: Modal sosial adalah perekat yang menyatukan masyarakat dan tanpanya tidak akan ada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan manusia. Tanpa modal sosial, masyarakat pada umumnya akan runtuh, dan dunia saat ini menyajikan beberapa contoh yang sangat menyedihkan dari konflik sebelumnya Untuk mengurai konflik antara pengungsi Suriah dan komunitas tuan rumah Lebanon, sangat penting untuk fokus pada modal sosial. Dalam kasus kami, kohesi sosial dan faktor penentunya seperti kepercayaan, identitas, ketidaksetaraan, akses ke sumber daya dan mata pencaharian akan dianalisis.

Menurut laporan resmi, 86% pengungsi Suriah tinggal di desa-desa Lebanon dan kota-kota yang dihuni oleh orang Lebanon yang paling rentan. Ketegangan baru dan lama tampaknya muncul kembali yang mempengaruhi iklim politik, ekonomi dan agama dan dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut, atau bahkan mengancam kohesi sosial lingkungan Lebanon (Rahman, 2019). Salah satu kepentingan utama dari makalah ini adalah untuk menyelidiki ketegangan yang ada di Lebanon ini. Studi kasus yang dipilih adalah Tripoli, ibu kota Lebanon Utara. Kota ini menderita tingkat pengangguran perkotaan tertinggi di negara itu dan kondisi kemiskinan paling ekstrem, diperburuk oleh masuknya 45.000 pengungsi Suriah terdaftar ke kota sejak 2012, menambah sekitar 100.000 pengungsi tidak terdaftar dari Suriah (Jayakarta, 2020).

Penderitaan Tripoli digambarkan dengan kondisi di Jabal Mohsen dan Bab el Tabaneh, yang terletak di pusat konflik dan ketidakstabilan di kota. Sebagai komunitas paling terbelakang di Tripoli, siklus kekerasan telah menelan korban yang luar biasa pada penduduk kota: bentuk utama kemiskinan di Tripoli adalah pengangguran dan ini dikombinasikan dengan ketidaksetaraan pendapatan. Perkiraan menunjukkan separuh populasi 'miskin' dan pengangguran melebihi 35%. Ketegangan sektarian memperburuk kondisi kehidupan yang buruk di mana orang Tripolitan tinggal, dan kepercayaan umum adalah bahwa kemiskinan mereka telah diperburuk oleh kedatangan pengungsi Suriah. Karena kurangnya kepekaan konteks dan pendanaan yang terbatas, praktisi pembangunan dan kemanusiaan sejauh ini gagal mengatasi konflik yang memisahkan warga Suriah dari Lebanon. Sebaliknya, intervensi mereka menargetkan bantuan darurat dan seringkali mengabaikan komunitas tuan rumah yang terkena dampak, sehingga bantuan itu sendiri dapat menjadi sumber ketegangan lainnya.

Oleh karena itu, makalah ini mencoba memetakan akar penyebab (atau pemicu) konflik untuk menyadarkan dan menginformasikan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dengan fokus pada ketenagakerjaan inklusif sebagai alat untuk mengurangi ketegangan dan mengurangi ketimpangan. Faktanya, literatur telah menunjukkan bahwa kebijakan insentif pekerjaan adalah cara yang efisien untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kohesi sosial. Baik melalui peningkatan kontak atau saling ketergantungan ekonomi antara kelompok-kelompok saingan, pekerjaan yang lebih tinggi pada akhirnya akan mengarah pada penurunan prasangka. Tidak jelas apakah ini yang terjadi di Tripoli, dan makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi untuk menguji tiga hipotesis, untuk menentukan apakah kondisi ini berlaku dalam konteks Lebanon-Suriah.

Untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada artikel ini, penulis menggunakan salah satu artikel yang berjudul Politik Konfesionalisme Lebanon: Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama yang ditulis oleh Farhan Hibatullah. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa salah satu konflik paling besar dalam sejarah Lebanon adalah peristiwa perang saudara 1975-1990. Politik konfesionalisme dipilih sebagai langkah politik paling rasional untuk menjaga stabilitas di Lebanon sampai saat ini. Secara *de facto* sesungguhnya politik konfesionalisme sudah hadir sejak awal deklarasi kemerdekaan Republik Lebanon melalui Pakta Nasional 1943. Melalui Taif Agreement 1990, politik konfesionalisme kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi Lebanon sebagai resolusi konflik atas perang sipil. Sampai saat ini politik konfesionalisme masih bertahan dan dijalankan oleh Lebanon. Namun demikian Lebanon hingga kini masih terus mengalami pergolakan di bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga efektivitas politik konfesionalisme ini terus dipertanyakan.

Secara umum pendekatan yang digunakan untuk membahas pada kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan dari teori Marxisme. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain (Wardana, 2014).

Sehingga, apa yang dimaksudkan oleh Marx berkenaan dengan teori konflik sesuai dengan pembahasan mengenai konflik sektarian Meskiun di Lebanon menggunakan sistem politik konfesionalisme namun tiap kelompok agama terutama yang dilakukan oleh Hizbullah terus melakukan ambisi politiknya yang seolah-olah ingin menjadi penguasa dalam kancah perpolitikan di Lebanon. Andaiupun upaya rekonsiliasi berjalan namun kenyataan konflik yang terjadi di wilayah Tripoli, Lebanon Utara semakin menjadi-jadi baik kelom Sunni yang diinisiasi oleh kelompok Salafis-Jihadist dengan kelompok Syiah yang disokong langsung oleh Rezim Assad di Suriah saling mempertahankan egoismenya yang menyebabkan Lebanon terus dilanda konflik hingga hari ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang mendefinisikan dan mengungkapkan perkembangan konflik Sunni Syiah di Lebanon. Berbagai data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1994) tahapan analisis data kualitatif adalah pengumpulan data, reduksi, display, dan kesimpulan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian sejarah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan sampai pada tahap eksplanasi sejarah (Sjamsuddin, 2015).

Hasil dan Pembahasan

A. Polarisasi Sunni Syiah Lebanon

Periode setelah 2005 dan Revolusi Cedar di Lebanon adalah yang paling sedikit dipelajari dalam literatur yang membahas konflik etnis di Lebanon (Knudsen & Kerr, 2013).

pembunuhan mantan Perdana Menteri Sunni Rafik Hariri pada 14 Februari 2005 mengubah wajah dan nasib Lebanon yang dapat memicu Revolusi Cedar, memecah negara menjadi dua kubu politik utama, pro-Suriah yang dipimpin Hizbullah di bawah pimpinan Hasan Nasrallah dan anti-Suriah Masa Depan Gerakan yang dipimpin milisi Sunni, yang menyebabkan polarisasi etnis lebih lanjut di Garis Sunni-Syiah dan banyak pemerintah persatuan macet karena senjata Hizbullah dan investigasi internasional atas pembunuhan Rafik Hariri (Abighanem, 2021) Periode setelah pembunuhan Hariri 2005 dan Revolusi Cedar juga didefinisikan ulang kesetiaan tradisional komunitas Sunni di Lebanon: dari para pendukung

Arabisme dengan Suriah dan tanah air Arab Sunni untuk memutuskan hubungan dengan Damaskus dan dukungan dari Negara Lebanon yang lebih kuat. Negara Lebanon menjadi benteng melawan hegemoni Suriah dan menegaskan dirinya dalam masalah keamanan dengan mengorbankan Suriah proxy Hizbullah (Naufal, 2012). Setelah penataan kembali ini, Saad Gerakan Masa Depan Hariri mengadopsi slogan Kristen "Lebanon first" serta wacana keberadaan senjata di luar kendali negara – jelas bertujuan di Hizbullah, yang tetap berhak atas gudang senjata setelah perjanjian Taif, sebagai perlawanan anti-Israel. Gerakan Masa Depan menyerukan negara Lebanon yang lebih kuat, aturan hukum, strategi pertahanan nasional dan menghormati kewajiban internasional seperti berpartisipasi dalam Pengadilan Khusus untuk Lebanon. Wacana baru sepenuhnya bertujuan untuk melumpuhkan legitimasi Hizbullah sebagai perlawanan Lebanon dan dimaksudkan untuk menekankan tentang status Partai Tuhan Syiah sebagai milisi bersenjata di luar kendali negara. Hal ini menyebabkan konflik antar faksi politik. Namun, karena kedua Gerakan Masa Depan dan Hizbullah menggalang dukungan melalui lembaga agama sekte masing-masing (Dewan Tinggi Islam Sunni dan, masing-masing, Dewan Tinggi Islam Syiah) the perbedaan diterjemahkan menjadi keretakan sektarian, terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok itu bersekutu dengan non-Sunni dan, masing-masing, kelompok non-Syiah. Namun, menurut Knudsen dan Kerr, Gerakan Masa Depan tetap menjadi payung politik yang hampir secara eksklusif mewakili komunitas Sunni, seperti halnya Hizbullah mewakili Syiah masyarakat (Kerr & Knudsen, 2012).

Sebenarnya, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kaum Nasionalis Lebanon agar supaya sistem Politik Konfessionalisme di Lebanon berakhir karena dianggap merugikan melalui perundingan yang diadakan di Taif, Arab Saudi dimulai pada September 1989 sampai terjadinya Perjanjian Taif (Taif Agreement) pada 22 Oktober 1989. Perjanjian ini terdiri atas empat prinsip yaitu, melakukan Reformasi politik di Lebanon, membangun hubungan khusus antara Libanon dengan Suriah, mengakhiri perang di Libanon dengan melakukan gencatan senjata dan membuat kerangka untuk upaya penarikan mundur pasukan Suriah di Libanon. Tetapi yang paling utama dari perjanjian ini adalah formalisasi Pakta Nasional yang dicantumkan dalam konstitusi Libanon yang menegaskan posisi jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan Libanon.

Fragmentasi pasukan keamanan Lebanon pada garis sektarian juga berkontribusi pada re-militerisasi masyarakat (Picard et al., 2013) Perusahaan keamanan swasta didirikan dan melayani zu'ama nasional dan lokal Lebanon⁴. Pasukan Lebanon pada 14 Maret dan Gerakan Patriotik Bebas pada 8 Maret saling menuduh mempersenjatai kembali dan melatih militan mereka (Luca, 2010). Gerakan Masa Depan sendiri mulai mengorganisir swasta perusahaan keamanan, seperti Future Security Plus, dengan merekrut pemuda dari from daerah miskin di Akkar, Lebanon Utara, dan Tripoli (LA Times, 2008) Dalam hal ini konteks, Hizbullah memutuskan untuk mendirikan jaringan telekomunikasi paralel; penemuan jaringan ini menyebabkan serangkaian bentrokan perkotaan antara pendukungnya jugasebagai pendukung kelompok politik sekutu dan pendukung politik 14 Maret. kelompok pada Mei 2008 (Picard et al., 2013).

Sistem politik Lebanon terutama mengamanatkan agar perimbangan antara kopmunitas-komunitas konvensional dipertahankan di parlemen serta seluruh jajaran pemerintahan. Yang kemudian semua itu diformulasikan dan disahkan dalam Pakta Nasional (Al-Mithaq Al-Watani) pada tahun 1943, sebuah kesepakatan tidak tertulis antar Presiden dan Perdana Menteri pertama Lebanon. Pakta Nasional tersebut merupakan sebuah usaha pragmatik untuk meredakan ketegangan diantara sekte-sekte religius yang ada.

Pengaruh yang besar dari luar Lebanon yang datang dari negara tetangga yaitu, Suriah dan Iran menambah kompleksitas konflik karena kedekatan historis dari kedua negara tersebut terutama Suriah yang sejak dulu memiliki misi khusus terhadap Lebanon yaitu, Misi Historis dan Misi Strategis, misi yang didasarkan pada anggapan bahwa Lebanon merupakan bagian tak terpisahkan dari negara "Suriah Raya" serta keinginan Suriah untuk menjadikan Lebanon sebagai negara penyangga (buffer state) guna membatasi serangan-serangan Israel ke Suriah. Sedangkan Iran sendiri mencoba untuk menanamkan pengaruh di Libanon dengan mendukung Hizbullah, karena dengan mendukung Hizbullah Iran dapat mencapai tujuan luar negerinya di timur tengah. Pertama, melawan Israel melalui kekuatan Hizbullah. Kedua, Iran bisa masuk langsung ke Timur Tengah dan memperluas pengaruh syi'ah di Libanon dengan meningkatnya pengaruh Hizbullah di negeri itu.

Ada hubungan yang saling berkaitan antara Suriah, Syi'ah Libanon dan Iran. Seluruh bantuan Iran yang berupa fisik harus dikirim melalui Suriah karena tanpa akses yang di berikan oleh Suriah akan sangat sulit bagi Iran untuk menyalurkan bantuan ke Lebanon, sehingga Suriah merupakan jalur keluar masuknya bantuan dari Iran ke Lebanon.

Apabila melihat dari dekat bagaimana pemberontakan Suriah berdampak pada genting politik dan sektarian keseimbangan negara tetangga Lebanon. Laporan tersebut mengutip sebagai faktor yang memberatkan untuk Krisis Lebanon meningkatkan dukungan bagi para pengungsi Suriah dan aktivis politik yang melarikan diri ke Libanon setelah peningkatan tindakan keras di

daerah pemberontak oleh Suriah pasukan pemerintah, peningkatan dukungan dari aktivis Lebanon yang menawarkan dukungan politik tetapi juga amunisi untuk pemberontak Suriah (Crisis Group, 2012). Itu juga menunjuk pada karakter yang semakin sektarian dari pemberontakan Suriah dan kebangkitan Islam Sunni yang telah dicerminkan di Lebanon; Sunni di Tripoli dan Lebanon Utara, dan terutama faksi-faksi Islam, telah lama bermusuhan dengan Suriah rezim (Sahidin, 2014). Mengingat bentrokan Mei 2008 antara Hizbullah dan pendukung Gerakan Masa Depan di Beirut, kedua faksi menunjukkan pengekanan untuk mengizinkan pertempuran meningkat; namun, laporan tersebut menunjukkan, "semakin serius bahaya muncul dari bentrokan spontan – lebih sulit dikendalikan dan dengan demikian lebih mudah menyebar – di antara mereka konstituen serta antara kelompok-kelompok kecil yang secara nominal milik masing-masing kamp (Crisis Group, 2012, hlm. 6). Tapi krisis itu masih ada dan muncul di Tripoli, antara kelompok bersenjata di Bab al-Tabbaneh yang didominasi Sunni dan Alawite Jabal Mohsen.

Selain itu, laporan tersebut juga mengutip retorika pejabat Gerakan Patriotik Bebas, the ketakutan seluruh komunitas Kristen terhadap gerakan Islamis serta perebutan Hizbullah kesempatan untuk menggambarkan seluruh komunitas Sunni dan Gerakan Masa Depan sebagai Islamis untuk menggalang lebih banyak dukungan di Lebanon atas keterlibatannya di Suriah dan memperkuat proyek politiknya di Lebanon. Ini juga menyoroti bahwa Masa Depan Gerakan melihat dalam konflik Suriah sebuah kesempatan untuk mencabut Hizbullah dari salah satu nya pelindung regional. Ini juga mengacu pada pembunuhan kepala cabang intelijen Pasukan Keamanan Dalam Negeri Wissam al-Hassan pada bulan Oktober 2012 sebagai kemungkinan pengubah permainan: Gerakan Masa Depan gagal mengumpulkan dukungan itu mengandalkan serangkaian protes anti-pemerintah, itu dituduh mendorong gagasan bahwa "Sunni sedang diserang." Namun, laporan tersebut menunjukkan keretakan antara Jalan Sunni dan Gerakan Masa Depan, menjelaskan bahwa kesenjangan menyebabkan munculnya pemimpin radikal seperti Salafi yang berbasis di Sidon Sheikh Ahmad al Assir, yang, dengan dukungan dari beberapa syekh Salafi Tripoli, berhasil mendapatkan pengikut dengan menggunakan yang lama Retorika Gerakan Masa Depan melawan senjata Hizbullah (Zaatari, 2006).

Hizbullah yang selama ini dikenal sebagai kelompok ekstrimis juga memiliki kedudukan utama dalam komposisi Pemerintahan Libanon. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 2006 dimana Hizbullah meraih 10 persen suara sehingga wakilnya menduduki 14 kursi dari 128 kursi yang tersedia di parlemen.

Krisis di Lebanon muncul kembali karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, pemerintahan Siniora dan Koalisi 14 Maret mendukung pembentukan Mahkamah Internasional dalam kasus terbunuhnya mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri, Hariri dibunuh karena menjadi tokoh penentang Suriah yang mengakibatkan militer negara Suriah

dipaksa keluar dari Libanon tahun 2004. Sementara itu, oposisi dari koalisi 14 Maret adalah Koalisi 8 Maret yang terdiri dari Hizbullah, Syi'ah, dan kelompok Kristen pimpinan Michel Aoun yang didukung oleh Suriah dan Iran. Koalisi ini menentang pembentukan Mahkamah Internasional tersebut, dan menganggapnya sebagai campur tangan kekuatan asing di Libanon. Kedua, Siniora dan Koalisi 14 Maret menolak tuntutan Koalisi 8 Maret yang dimotori oleh kelompok Hizbullah atas jatah sepertiga kursi dewan menteri. Bagi Koalisi 14 Maret, menerima tuntutan itu sama halnya menyerahkan pemerintah Libanon.

Padahal Koalisi 8 politik yang didukung oleh Presiden Emile Lahoud yang pro Suriah, dan Ketua Parlemen Nabih Berri yang juga ketua Partai Amal Syi'ah. Namun, politik Libanon tidak hanya dipengaruhi faktor dalam negeri, faktor luar negeri juga ikut mendominasi. Kubu pro-Suriah membentuk poros Suriah dan Iran, sedangkan kubu anti-Suriah membentuk poros Amerika Serikat dan Perancis. Kubu pro-Suriah sangat membutuhkan dukungan Suriah dan Iran untuk menghadapi agresi Israel. Sebaliknya, kubu anti-Suriah membutuhkan Amerika Serikat dan Perancis untuk mempertahankan kekuatan politik dalam negeri mereka.

Dia juga terlihat pada tren anti-statistik di kalangan komunitas Sunni di Libanon Utara, kurangnya kepemimpinan politik pemersatu dan karismatik setelah kematian Rafik Hariri, the kritik terhadap Saad Hariri dan Gerakan Masa Depan sebagai kekuatan politik moderat, kegagalan Gerakan Masa Depan untuk membangun kekuatan keamanan yang terorganisir untuk meyakinkan komunitas menghadapi kebangkitan Hizbullah, dan keengganan konservatif non-radikal kekuatan seperti Jamaa al-Islamiya untuk menggantikan Gerakan Masa Depan dan menggalang dukungan dari faksi-faksi Islam. Aspek lain dari krisis dalam pandangan Lefèvre adalah kurangnya kepercayaan pada agama Sunni kemapanan dan hadirnya gerakan Islam radikal yang menggantikan kaum moderat Sunni Dar al Fatwa dalam melayani masyarakat (Vogt, 2019).

Juga dan aspek penting dari krisis adalah kenyataan bahwa komunitas Sunni di Tripoli adalah terpolarisasi politik. Terlepas dari kenyataan bahwa ada sentimen anti-Suriah yang kuat di Tripoli, ada kelompok-kelompok kecil yang secara politik bersekutu dengan pro-Suriah 8 Maret, seperti sebagai Gerakan Tawid atau kelompok pendukung mantan Perdana Menteri Libanon Omar Karami, Hizbullah memperkuat mereka secara finansial dan militer sebagai bagian dari strateginya di pertengahan 2000-an. Lefèvre berpendapat bahwa meskipun krisis di Tripoli benar-benar politis, ia mengambil bentuk sektarian itu akhirnya menyebabkan keengganan dari pasukan keamanan untuk campur tangan karena takut mengganggu keseimbangan sektarian pasukan. "Kritik Sunni terhadap Angkatan Bersenjata Libanon (LAF) dulu terbatas pada sudut ekstremis dari komunitas itu, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih umum (Micocci, 2016). Beberapa Sunni merasa mereka telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil dibandingkan dengan Syiah pada umumnya dan Hizbullah pada khususnya. Tuduhan standar ganda telah berlipat ganda di bangkit dari krisis

Suriah, terutama setelah keterlibatan Hizbullah dalam konflik dan serangan berulang oleh jet tentara Suriah di desa-desa Sunni Lebanon di daerah perbatasan dari Akkar dan Aarsal” (Lefèvre, 2014). Sastra kaya akan etnis, minoritas, dan konflik etnis di Timur Tengah. Sebagian besar melihat Lebanon sebagai contoh pengelolaan konflik etnis melalui konsosiasionalisme. Tetapi masalah dengan sebagian besar literatur tentang konflik etnis di Lebanon sangat sedikit yang mengacu pada dilema keamanan saat ini dalam konflik antara komunitas Syiah dan Sunni, penyebab utama polarisasi dan konflik dan katalisator eskalasinya dalam beberapa tahun terakhir, setelah dimulainya Musim Semi Arab dan, khususnya, krisis Suriah.

Krisis politik di Lebanon mencapai puncaknya ketika pada pertengahan bulan Mei 2008 pemerintah Lebanon mengeluarkan dua kebijakan yang berisi tentang pembekuan sarana komunikasi Hizbullah dan pemberhentian kepala keamanan bandara internasional Rafik Hariri (yang dekat dengan Hizbullah) yang menimbulkan kemarahan dari Hizbullah yang mengakibatkan terjadinya bentrok antara koalisi oposisi yang di motori Hizbullah dengan kelompok milisi pendukung koalisi partai-partai yang berkuasa atau kelompok mayoritas yang berlangsung selama kurang lebih sepekan di kota Beirut, bahkan kerusuhan sampai meluas ke pegunungan Lebanon (Pegunungan Ahad) sampai ke wilayah utara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa lebih dari 300 orang serta menyebabkan kelumpuhan total di Beirut. Dalam kontak senjata tersebut milisi oposisi keluar sebagai pemenang dengan keberhasilannya menduduki Beirut sebagai bukti bahwa milisi Hizbullah merupakan kekuatan militer yang masih sangat dominan di Lebanon (Ghafur, 2015).

B. Keterkaitan Politik Suriah pada Konflik Bab El Tabbaneh – Jabal Mohsen Lebanon

Efek limpahan dari perang Suriah di Lebanon memiliki efek paling merusak pada hubungan sektarian negara itu. Mobilisasi anti dan pro-rezim di sepanjang garis patahan Sunni-Syiah yang sebagian besar menyebabkan peningkatan konflik dan agitasi. Ketika perang di Suriah berubah menjadi sektarian, terutama di Homs pada Februari 2012, di mana rezim menargetkan daerah-daerah oposisi dengan kebijakan bumi hangus dan preman lokalnya (shabiha) melakukan pembantaian sektariansentimen Sunni di Lebanon berubah dari solidaritas dengan pemberontak menjadi partisipasi aktif dalam perang Suriah. Ini terutama terjadi di wilayah perbatasan utara Tripoli dan Akkar dan Lembah Beqaa timur.

Perampasan sosial ekonomi, marginalisasi politik, penangkapan tanpa pandang bulu, penahanan tanpa batas dan penyiksaan terhadap kelompok Islam Sunni, ditambah dengan warisan mereka sebagai pusat sentimen Salafi di negara itu, digabungkan untuk membuat daerah-daerah ini menjadi tempat perlindungan bagi pemberontak Suriah dan Syekh Salafi di Lebanon meminta pengikut mereka untuk bergabung dalam pertempuran di Suriah untuk membela sesama mereka. Aliran militan Salafi yang stabil menyeberang ke Suriah dari kota-kota utara untuk bergabung

dalam pertempuran melawan rezim. Kematian lebih dari 100 pejuang dari Tripoli dalam pertempuran untuk Qalat al-Hosn di Homs pada Maret 2014 menunjukkan bahwa sejumlah besar ekstremis Salafi mengindahkan seruan ini. Garis patahan sektarian di Suriah direproduksi di Lebanon utara, seperti Bab al Sunni Tripoli - Lingkungan Tabbaneh dan bagian puncak bukit Alawi di Jabal Mohsen dikonsumsi sepanjang tahun 2012 dan 2013 dengan bentrokan yang terputus-putus. Memanfaatkan serbuan senjata dan dana ke daerah itu untuk mendukung perjuangan pemberontak Suriah, kelompok Salafi di utara berusaha membangun benteng mereka sendiri untuk mengimbangi Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Milisi Sunni segera menjamur di seluruh negeri, dari Tripoli di utara, melalui distrik yang didominasi Sunni di Beirut, sampai ke kubu Salafi Sheikh Ahmad al-Asir di selatan.

Mereka menargetkan LAF, menuduhnya mempersulit gerakan lintas batas kelompok anti-rezim Suriah dan Lebanon, dan mengoordinasikan operasi militernya di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon dengan Hizbullah. Konfrontasi antara LAF dan kelompok Salafi lokal dan militan Sunni mencapai klimaksnya pada Juni 2013 ketika mereka menyerbu kubu Sheikh Asir di Sidon setelah para pengikutnya menyerang sebuah pos pemeriksaan militer. Itu diikuti oleh operasi militer yang lebih luas di Tripoli pada Januari 2014 melawan militan Salafi yang sekarang beroperasi di luar kendali elit politik kota. Ini tidak melindungi negara dari serangan bunuh diri yang diilhami oleh Salafi-jihadi. Lingkungan agitasi sektarian yang meningkat dan konflik yang disebabkan oleh efek limpahan perang di Suriah juga memungkinkan jaringan Salafi-jihadi transnasional untuk terhubung dengan afiliasi lokal, terutama di kamp-kamp pengungsi Palestina, dan melancarkan operasi teroris di Lebanon. Brigade Abdullah Azzam sebuah organisasi Palestina yang berbasis di Lebanon yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda, Jund al-Sham dan Jabhat al-Nusra (JAN) melancarkan atau memfasilitasi sejumlah serangan teroris terhadap LAF, kedutaan besar Iran dan pusat budaya, dan kubu Hizbullah di Beqaa dan Beirut. Mereka memanfaatkan campuran yang mudah terbakar dari sentimen sektarian yang gelisah dan kekurangan sosial ekonomi untuk menghasilkan generasi baru Salafijihadi di kamp-kamp pengungsi Palestina, terutama Ain al-Hilwi di selatan dan Burj al-Barajneh di Beirut. Bertindak sebagai jembatan antara kelompok-kelompok radikal Lebanon dan agitasi sektarian dan konflik mereka yang meningkat yang disebabkan oleh efek limpahan perang di Suriah memungkinkan jaringan Salafi-jihadi transnasional untuk terhubung dengan afiliasi lokal, terutama di kamp-kamp pengungsi Palestina, dan meluncurkan operasi teroris di Libanon.

Titik nyala lainnya adalah kota perbatasan terpencil Aarsal di timur laut. Awalnya sebuah kota berpenduduk 30.000 orang, secara bertahap kota ini menyerap sekitar 90.000 pengungsi dari Suriah. Kemenangan tentara Suriah dan Hizbullah dalam pertempuran Yabroud di punggung Qalamoun mendorong militan ISIS dan JAN lebih dekat ke perbatasan Lebanon. Ini mengubah kota

dan kamp-kamp pengungsi dan sekitarnya menjadi tempat perlindungan bagi militan dan simpatisan ISIS dan JAN, dari mana mereka merekrut anggota baru dan merencanakan dan meluncurkan operasi teroris melawan LAF dan Hizbullah. Pada bulan Agustus 2014, dan setelah LAF menangkap seorang agen al-Qaeda yang dituduh merencanakan sejumlah serangan teroris, para militan ini menguasai posisi tentara, menyandera sekitar 42 tentara dan polisi, dan mengambil kendali penuh atas kota. Setelah pertempuran sengit antara LAF dan militan Salafi-jihadi, sekelompok syekh Salafi merundingkan penyelesaian aneh yang memungkinkan pejuang ISIS dan JAN untuk mundur dari Aarsal ke pedalaman kota dengan sekitar 39 sandera. Meskipun beberapa operasi LAF melawan militan ISIS dan JAN di dan di sekitar Aarsal berhasil menyangkal kelompok-kelompok militan sebuah tempat perlindungan di kota, mereka terus beroperasi di sana, bersaing untuk menguasai penyeberangan perbatasan ilegal. Sebagai tanda berlanjutnya efek limpahan perang di Suriah di kota tersebut, pada April 2016 LAF berhasil membunuh pemimpin ISIS di Aarsal dan menangkap sejumlah militan lain yang dituduh berpartisipasi dalam serangan tahun 2014.

Ironisnya, meskipun menjadi sasaran dari lingkungan umum agitasi sektarian yang meningkat di negara ini, Hizbullah banyak memanfaatkan sektarianisasi yang intens dari ruang publik Arab untuk memobilisasi kekuatannya. pendukung untuk pertempuran di Suriah, menopang kepercayaannya di dalam komunitas Syiah, dan menetralsir kritik yang diredam tetapi nyata terhadap biaya manusia yang mengejutkan dari intervensi Suriahnya. Partai sekarang memaafkan simbolisme dan wacana sektarian Syiah-Alawi yang terang-terangan di benteng-bentengnya di pinggiran selatan Beirut yang pernah dikutuk dan mencoba untuk memisahkan diri darinya. Selain itu, dengan menjaga pos-pos pemeriksaan tetap, menutup seluruh lingkungan, dan melakukan persenjataan rutin. patroli untuk melindungi dari ancaman teroris asli dari kelompok Salafi-jihadi, secara terbuka memikul tanggung jawab dan hak prerogatif badan keamanan negara (Saab & Ranstorp, 2007).

Ia juga mengintensifkan upaya perekrutan dan operasi pelatihannya di dalam komunitas inti Syiahnya, tetapi juga di luarnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dua teater militer yang sangat berbeda. Ini telah menimbulkan kemarahan komunitas lain, yang menuduh Hizbullah beroperasi lebih seperti milisi bersenjata di luar batas-batas hukum. Ini juga telah mengakar "status bersenjata dan perluasan milisi di dalam komunitas [Syiah]", dan dalam prosesnya melepaskan praktik-praktik melanggar hukum di antara para anggota dan pendukungnya yang pada akhirnya menodai reputasi partai yang dulu sangat baik. Meningkatnya insiden Agitasi dan konflik sektarian SunniSyiah setelah perang di Suriah juga telah mempengaruhi hubungan intra-elit dan membawa Lebanon ke kemacetan politik yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah merupakan sebuah kontestasi politik yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat melibatkan peperangan, kesenjangan sosial, hingga ada sentiment rasis antar pemeluk Agama di wilayah Timur Tengah. Berawal dari pemahaman konsep politik sectarian di Lebanon yang memicukan ambisi politik diantara pemeluk keagamaan yang menjadi faktor krisis politik berkepanjangan di Lebanon. Pengaruh Revolusi Suriah juga ikut berkontribusi dalam perkembangan krisis politik di Lebanon. Hingga saat ini Lebanon merupakan negara Timur Tengah yang selalu dilanda pada masalah kemiskinan, dan inflasi yang memaksakan Sebagian rakyat Lebanon untuk pergi meninggalkan status kewarganegaraannya.

REFERENSI

- Abighanem, N. (2021). *Civil Society Organizations in Demobilization and Reintegration : the Ties and Lives of Ex-combatants in Lebanon. October.*
- Ghafur, M. F. (2015). Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah Dan Aljazair. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 119–135. file:///C:/Users/HP/Downloads/545-1158-1-SM.pdf
- Hibatullah, F. (n.d.). *Politik Konfesionalisme Lebanon : Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama.* Jakarta, M. (2020). Analisis Dinamika Keterlibatan Hizbullah dalam Konflik Suriah Pasca Pemilu Parlemen Lebanon 2018. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id.* <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50048>
- Kerr, M., & Knudsen, A. J. (2012). *Lebanon : after the Cedar Revolution.* 323.
- Micocci, F. (2016). Envisioning a post-conflict Tripoli: The inclusive urban strategy and action plan for Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen. *Footprint*, 2016(19), 57–78. <https://doi.org/10.7480/footprint.10.2.1160>
- Nala Estriani, H. (2018). The Syrian Refugee in Lebanon: Moving Towards Securitization. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72133>
- Naufal, H. (2012). Syrian Refugees in Lebanon: the Humanitarian Approach under Political Divisions. *Migration Policy Centre, MPC-RR No. 2012/13*, 25.
- Picard, E., Trafficking, E. P., Cynthia, W., & Picard, E. (2013). *Trafficking , Rents , and Diaspora in the Lebanese War To cite this version : HAL Id : halshs-00807577 Trafficking , Rents , and Diaspora in the Lebanese War.*
- Rahman, S. (2019). Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring : Kasus Tunisia dan Yaman. *Jurnal ICMES*, 3(1), 101–121.
- Saab, B. Y., & Ranstorp, M. (2007). Securing Lebanon from the threat of salafist jihadism. In *Studies in Conflict and Terrorism* (Vol. 30, Issue 10). <https://doi.org/10.1080/10576100701561236>
- Sahidin, R. (2014). *Peran hizbullah dalam pemerintahan di lebanon (1992-1997).* 30–46.

- The Culture of Motherhood : An Avenue for Women ' s Civil Participation in South Lebanon* Author (s): Zeina Zaatari Source : *Journal of Middle East Women ' s Studies*, Winter, 2006, Vol. 2, No. 1 (Winter, Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/>. (2006). 2(1), 33-64.
- Vogt, K. E. (2019). *Keep Them Isolated, Keep Them Down! Patterns of (Non-)Militarisation among Syrian Refugees in Lebanon*. Master's Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo.
- Wardana, A. (2014). Teori Konflik I: Marxis dan Neo Marxis Fungsionalisme vs Konflik. *Teori Konflik I : Marxis Dan Neo Marxis*, 1-12.